

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- HAW. Wijaya, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Suatu Telaah Administrasi Negara )*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Inu Kencana Syarif, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- , *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia ( Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah )*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Arif, *Peraturan tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Pekanbaru: RedPoStt Press, 2007.
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah ( Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika )*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah ( Edisi ke-II dengan Revisi)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Philipus.M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.

Ridwan,HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syaukani,dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Edisi Revisi*, Bandung: Fokus Media, 2003.

S.F,Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Unang Sunardjo, *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito, 1994.

Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997. Tentang pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negrara Agrarian / Kepala Bagian Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999. Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003. Tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005. Penjelasan Tentang Pengadaan Tanah Bagian pelaksanaan Untuk Kepentingn Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa